



**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(RLPPD)
KABUPATEN NGADA TAHUN 2025**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salve,

Syalom,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Sejahtera,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hikmatnya sehingga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang diamanatkan dipundak kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan kepada masyarakat Ngada tercinta sepanjang tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Ringkasan LPPD merupakan informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. RLPPD ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara konstitusional terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki.

Adapun Ringkasan LPPD Kabupaten Ngada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,04	72,53	0,68
2.	Persentase Penduduk Miskin	11,87	11,22	-5,48
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,68	2,6	-2,99
4.	Pertumbuhan ekonomi	3,66	4,28	16,94
5.	PDRB per kapita Berdasarkan atas Harga Berlaku (ADHB)	4.47209	4.77589	6.79
6.	Ketimpangan pendapatan (Ratio Gini)	0,343	0,307	-10.50

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh Kabupaten Ngada pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	50,39	65,44
2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	85,8	91,43

3.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,87	43,36
4.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	53,02	30,92
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Tidak terdapat indikator ini pada tahun 2024	34,94

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Ngada Tahun 2025 sebesar Rp. 253.713.422.772 dari target anggaran sebesar Rp. 261.627.142.370 atau 96,98% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan target anggaran Rp. 106.081.731.124 dan terealisasi sebesar Rp. 99.287.891.526 atau 93,60%.
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target anggaran sebesar Rp. 15.443.905.039 dan teralisasi sebesar Rp. 13.865.004.190 atau 89,78%.
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.331.855.820 dan terealisasi sebesar Rp. 3.252.971.548 atau 97,63%.
- 4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan target anggaran sebesar Rp. 476.603.500 dan terealisasi sebesar Rp. 462.612.299 atau 97,06%.

Sehingga total anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program ini adalah Rp. 125.334.095.483 dan terealisasi sebesar Rp. 113.091.377.320 atau 96,53%.

b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan dengan target anggaran sebesar Rp. 648.011.000 dan teralisasi sebesar Rp. 647.671.000 atau 99,03%.
- 2) Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan dengan target sebesar Rp. 27.020.000 dan teralisasi sebesar Rp. 27.015.000 atau sebesar 99,98%.

Sehingga total anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 675.031.000 dan terealisasi sebesar Rp. 674.686.000 atau sebesar 99,25%

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Ngada pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Pemberian bantuan seragam bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP (Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (PAUD,SD,SMP) yang tidak direalisasi sebagai akibat tidak sesuai Spek.
2. Retensi atas pembangunan area bermain, pembangunan jamban dan rehabilitasi ruang kelas (Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD) yang tidak direalisasi karena pihak ketiga tidak mengajukan.
3. Untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD sebesar Rp. 12.642.500, tidak direalisasikan sebagai akibat sanksi pekerjaan yang belum dibayar (Denda).

Solusi :

1. Terhadap bantuan seragam bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dilakukan Addendum dan akan dianggarkan di Perubahan Anggaran Tahun 2026.
2. Retensi atas pembangunan area bermain, pembangunan jamban dan reahabilitasi ruang kelas akan dianggarkan lagi di perubahan anggaran tahun 2026 dan dinas akan melakukan pendekatan dengan pihak ketiga sehingga bisa terealisasi.

2. Urusan Kesehatan**A. Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh Kabupaten Ngada pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase kematian ibu	0,61	0,35
2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	100	14,50
3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	90,27	96,76
4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	99,83	84,47
5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	99,04	99,34
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,72	91,93

7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	91,68	91,43
8.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	55,49	85,27
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73,68	75,48
10.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	63,67	99,22
11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	64,44	94,08
12.	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	100
13.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	85,43	75,66
14.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	84,32	95,33

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Ngada Tahun 2025 sebesar Rp. 119.527.158.909 dari target Rp. 231.365.166.973 atau 93,9% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 41,479,119,482 dan terealisasi sebesar Rp 38,546,700,816.10 atau 92,9%.
 - 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 20,660,581,881 dan terealisasi sebesar Rp. 19,380,005,771.37 atau 93,8%
 - 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan target anggaran sebesar Rp. 174,877,000 dan terealisasi sebesar Rp. 173,086,650 atau 98,9 %.

Sehingga total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp. 62,314,578,363 dan teralisasi sebesar Rp. 58,099,793,237.47 atau 93,2 %.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 5,897,910,000 dan teralisasi sebesar Rp. 5,312,209,800 atau 90%.
- 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 865,284,000 dan terealisasi sebesar Rp. 793,673,700 atau 91,7%.

Sehingga total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp. 6,763,194,000 dan teralisasi sebesar Rp. 6,105,883,500 atau 90,02% %.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Ijin Apotik, Toko Obat, Tokoh Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan target anggaran sebesar Rp. 116,045,000 dan terealisasi sebesar Rp. 95,560,000 atau 82,3%.
- 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT dengan target anggaran Rp. 115,296,750 dan terealisasi Rp. 56,584,250 atau 49.1%.
- 3) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pos Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan target anggaran sebesar Rp. 247,195,250 dan terealisasi sebesar Rp. 127,353,350 atau 51.5%.

Sehingga total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp. 478,537,000 dan teralisasi sebesar Rp. 279,497,600 atau 58,4 %.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Ngada dengan target anggaran sebesar Rp. 39,375,000 dan teralisasi sebesar Rp. 34,790,000 atau 88,3%
- 2) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 96,690,000 dan terealisasi sebesar Rp. 96,086,000 atau 99,3%.
- 3) BOK 24 Puskesmas dengan target anggaran sebesar Rp. 20.568.270.962 dan terealisasi sebesar Rp. 18.068.488.344 atau 87,85%.
- 4) JKN Kapasitas 24 Puskesmas dengan target anggaran sebesar Rp. 8.783.224.152 dan terealisasi sebesar Rp. 7.964.677.491 atau 90,68%.

Sehingga total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp. 136,065,000 dan teralisasi sebesar Rp. 130,876,000 atau 96,1 %.

RSUD

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target anggaran sebesar Rp. 13.063.410.756 dan terealisasi sebesar Rp. 12.998.320.753 atau 99,8%;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 1) Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM wilayah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 4.081.100.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.080.979.929 atau 99%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Ngada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan

Dinas Kesehatan

- a. Terlambatnya pengajuan UP (Uang Persediaan), sehingga kegiatan dengan pihak ketiga, seperti pelatihan menjadi terhambat dan menumpuk di akhir tahun. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan anggaran.
- b. Pembangunan Puskesmas Inerie belum mencapai 100%
- c. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan obat dan BMHP yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Khusus).

RSUD

- 1) Minimnya Sumber Daya Manusia baik Kuantitas maupun Kualitas
 - Berakhirnya masa berlakunya sertivikat pelatihan kegawat daruratan petugas IGD, belum adanya prlatihan bagi tenaga ICU/NICU yang sesuai standar sehingga menurunkan angka capaian kinerja Rumah sakit
 - Masih banyak tenaga Kesehatan yang belim dilatih sesuai dengan standar yang ditetapkan bagi rumah sakit type C dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Proses perencanaan APBD yang tidak terencana secara baik oleh bidang sehingga menimbulkan banyak kekurangan dan kendala dalam proses kegiatan.
- 3) Lahan rumah sakit yang sempit.

Solusi

Dinas Kesehatan

1. Sejak bulan Januari sudah dilakukan rekon aset bersama Puskesmas. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.
2. Melanjutkan pembangunan Puskesmas Inerie di 2026 dengan bersumber dari DAK Nonfisik.
3. Menggunakan dana JKN Kapitasi Puskesmas, untuk membantu mengatasi keterbatasan obat dan BMHP di Puskesmas
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.

RSUD

1. Melakukan advokasi dengan sektor terkait dalam proses rekrutment tenaga sesuai dengan kebutuhan saat penerimaan CPNSD. Untuk saat ini pihak RSUD mengambil kebijakan dengan menerima tenaga kontrak BLUB dalam memenuhi kebutuhan pelayanan melalui proses seleksi yang dianggap memenuhi persyaratan.
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga Kesehatan rumah sakit secara berkala khususnya petugas IGD,ICU/NICU yang masih dibawah standar rumah sakit.
3. Melibatkan semua unit dan bidang dalam proses perencanaan APBD sehingga semua usulan dapat terakomodir dan mengurangi masalah dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4. Merencanakan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana RSUD Bajawa sesuai kebutuhan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh Kabupaten Ngada pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	0,0	54,74
2.	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	0,0	34,79
3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	5,65	16,29

4.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	51,55	0,56
5.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	8,04	0,0
6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100	Tidak dapat dilaksanakan
7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	36,65	100
8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	0,0	Tidak dapat dilaksanakan
9.	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,0	0,0
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	0,0	0,0

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Ngada Tahun 2025 sebesar Rp. 41.658.403.162 dari target Rp. 42.127.309.656 atau 99% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):

- 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 1.327.120.000 dan teralisasi sebesar Rp. 1.111.935.000 atau 83,79%.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 10.902.640.133 dan terealisasi sebesar Rp. 10.112.863.235 atau 92,76%.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 5.125.766.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.073.412.145 atau 98,98%.

- d. Program Penataan Bangunan Gedung:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan target anggaran sebesar Rp. 99.640.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.330.026 atau 25,82%.
- e. Program Penyelenggaraan Jalan:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 5.659.093.948 dan terealisasi sebesar Rp. 5.450.363.683 atau 96,31%.
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan target anggaran sebesar Rp. 34.210.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.440.000 atau 65,59%
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang:
 - 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target anggaran sebesar Rp. 267.717.000 dan terealisasi sebesar Rp. 260.202.853 atau 97,19%

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Ngada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- a. Proses tender yang menggunakan LPSE seringkali mengalami keterlambatan.
- b. Dana-dana retensi sebagai akibat Pihak Ketiga tidak mengurus FHO dari tahun ke tahun yang menyebabkan perbandingan antara uang yang tersedia pada DPA-SKPD dengan outcome yang ada menjadi tidak seimbang. Dana retensi ini menjadi beban tersendiri dalam pengelolaan keuangan pada

Solusi:

- a. Mengoptimalkan semua fasilitas yang ada di kantor terutama kendaraan pegawai digunakan secara maksimal untuk kepentingan urusan lintas dinas dan Bank.
- b. Proses tender diupayakan lebih cepat sehingga pekerjaan fisik dilapangan, pelaksanaanya bisa lebih cepat juga.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh Kabupaten Ngada pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0,0	Tidak dapat dilaksanakan
2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100%	Tuntas Hasil 100%
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	0,0	0,16
4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12,14	34,72

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Ngada Tahun 2025 sebesar Rp. 530.825.000 dari target Rp. 530.940.000 atau 99,9 % dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan target anggaran sebesar Rp. 8.423.849.920 dan terealisasi sebesar Rp. 6.457.432.000 atau 76,6%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Ngada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

Untuk tahun 2025, anggaran untuk program ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran 2025 tidak mendapatkan dana DAK untuk bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Akibat peruntukan penganggaran DAU Spesifik Grand, bantuan perumahan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah bukan merupakan SPM sehingga tidak ada anggaran yang signifikan.

5. Urusan Trantibum dan Linmas

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Trantibum dan Linmas yang diperoleh Kabupaten Ngada pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100	33,33
2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	26,92	100
3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	0,17	43,75
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,17	0,88
5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1,30	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	86,67

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum dan Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum dan Linmas di Kabupaten Ngada Tahun 2025 sebesar Rp.9.400.583.339 dari target Rp. 11.081.947.491,61 atau 84,8 % dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran :

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 758.140.000 dan terealisasi sebesar Rp. 734.125.000 atau 96,83%.
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dari Peraturan Bupati/Walikota dengan target anggaran sebesar Rp. 104.457.500 dan terealisasi sebesar Rp. 91.124.950 atau 87.24%

Sehingga anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp. 862.597.500 dan terealisasi sebesar Rp. 834.906.950 atau 96,79%.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 57.664.500 dan terealisasi sebesar Rp. 53.663.940 atau 93,06%
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dengan target anggaran sebesar Rp. 3.851.500 dan terealisasi sebesar Rp. 3.851.500 atau 100%.
- Sehingga anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp. 61.516.000 dan terealisasi sebesar Rp. 57.515.440 atau 93,5%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana dengan target anggaran sebesar Rp. 266.431.900 dan terealisasi sebesar Rp. 23.414.667 atau 8,79%
- 2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target anggaran sebesar Rp. 153.364.000 dan terealisasi sebesar Rp. 139.099.650 atau 90,7%.

b. Program BTT Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Saldo	Keterangan
1	Pengerjaan darurat bencana tanah longsor di jalur jalan Tada-Waebela	85.172.000	85.172.000		
2	Pengerjaan darurat bencana tanah longsor di jalur jalan Tada-Waebela	40.586.000	40.586.000		
3	Penanganan Darurat Bencana Di Jalur Jalan Bena-Jerebuu	38.374.000	38.374.000		
4	Terima uang penanganan darurat di jalur jalan bena - jerebuu	98.496.000	98.496.000		
5	Jembatan di jalur jalan jurusan soa rowa dusun wolodhala desa sobo I kecamatan golewa barat	100.852.000	99.152.000	17.00.000	Setor kembali
6	Pembangunan TPT Di Desa Were Kecamatan Golewa	230.531.000	230.531.000		
7	Pembangunan Saluran Pasangan Dengan Mortair Di Daerah Hulu Enabara Desa Were III Kecamatan Golewa	145.286.000	145.286.000		
8	Pembangunan saluran di jalan weluja-wogowela segmen kalameze RT 10 Desa Were III Kecamatan Golewa	133.227.000	133.227.000		
9	Pembangunan Saluran Pasangan Dan Rabat Bahu di Jalan Segmen Waekeke Desa Were V Kecamatan Golewa	151.376.000	151.376.000		
10	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Dijalan Jurusan Jawameze-Desa Beiwali-Wawowae-Mukufoka Kecamatan Bajawa	46.022.000	44.922.000	1100000	Setor kembali
11	Penanganan Darurat Rehabilitasi Plat Duicker Watumanu Di Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu	70.000.000	70.000.000		
12	Perbaikan Pipa Di Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan	20.000.000	20.000.000		
13	Rehabilitasi Plat Duicker Waefiso Di Desa Uluwae II Kecamatan Bajawa Utara	17.477.000	17.477.000		

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Saldo	Keterangan
14	Rehabilitasi Plat Duicke Jalan Tani Di Matatawa Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada	17.523.000	17.523.000		
15	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Wolongizu Desa Boba I Kecamatan Golewa Selatan Dan Jalur Tada Waebela Desa Manubhara Kecamatan Inerie	25.312.000	25.312.000		
16	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Wolongizu Desa Boba I Kecamatan Golewa Selatan	17.866.000		17.866.000	Setor kembali
17	Perbaikan Saluran Irigasi P3A Turakupe Di Desa Meliwaru Kecamatan Soa	47.529.000	47.529.000		
18	Pembangunan Plat Duicker 2X2 m Dan Jalan Alternatif Di Desa Takatunga Kecamatan Golewa Selatan	300.000.000	300.000.000		
19	Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Di Jalur Jalan Tada-Waebela-Wolongizu dan Jalur Jalan Sarasedu-Ngorabolo-Laja Kecamatan Golewa Selatan	64.602.000	64.602.000		
20	Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Dijalur Jalan Wawa-Teni Lopijo Desa Haewea Kecamatan Inerie	113.900.000	96.900.000	17.000.000	Setor kembali
21	Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah Di Desa Kelitey Kecamatan Inerie	85.324.000	85.324.000		
22	Rehabilitasi Pengaman Saluran Irigasi Kupekapa Di Desa Mengeruda Kecamatan Soa	27.758.000	27.758.000		
23	Kegiatan Penanganan Darurat Perbaikan Badan Jalan Rabat Beton di desa Ria I Kecamatan Riung Barat	53.589.000	53.589.000		
24	Rehabilitasi Rabat Lantai Dan Tembok Penahan Tanah di Kelurahan Jawameze	59.449.000	59.449.000		
25	Penanganan Darurat Perbaikan Jalan Ruas Mangulewa-Jerebuu-Wogowela-Segmen Niolewa	417.500.000	417.500.000		
26	Penangana Darurat Perbaikan Jalan Ngorabolo-Hedhapoma Kecamatan Golewa Selatan	400.453.000	400.453.000		
	Jumlah	2.808.204.000	2.770.538.000	37.666.000	

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum dan Linmas di Kabupaten Ngada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

- Penanganan penegakan Perda belum sampai dilimpahkan ke Pengadilan sehingga tidak adanya efek jera bagi pelanggar Perda.
- Anggota lingkup Satpol PP belum mengikuti Diklat Dasar.
- Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum.
- Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran yaitu kendaraan tangki air untuk mensuplai air pada saat kejadian kebakaran dan mobil patroli pemadam untuk pengamanan kendaraan dinas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan tugas.

- e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan undang-undang Lalu Lintas khususnya skala prioritas bagi kendaraan pemadam kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan :
 - ❖ Keterbatasan anggaran
 - ❖ Kurangnya kapasitas SDM
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana:
 - ❖ Kurangnya personil dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi
 - ❖ Keterbatasan peralatan

Solusi :

Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Mengoptimalkan PPNS agar setiap pelanggar Perda diproses sesuai peraturan perundang-undangan dan berkasnya dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Merencanakan Diklat Dasar anggota Satpol PP Kabupaten Ngada untuk mengikuti pendidikan dasar Pol PP.
- c. Bangun kemitraan yang intensif dengan penegak hukum lainya dan instansi terkait.
- d. Diperlukan penambahan sarana pemadam kebakaran berupa mobil tangki air dan mobil patrol pemadam kebakaran.
- e. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat berkaitan dengan UU Lalu lintas sehingga tidak menimbulkan keterhambatan petugas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- f. Perlu ditambahkan sarana keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Membutuhkan pelatihan dasar untuk peningkatan kapasitas SDM.
- b. Karena berkaitan dengan urusan wajib layanan dasar, maka prioritas anggaran menjadi hal perlu dipertimbangkan.
- c. Mengajukan penambahan personil serta membutuhkan pelatihan dasar untuk peningkatan kapasitas.
- d. Mengajukan penambahan peralatan.
- e. Peningkatan kapasitas SDM.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh Kabupaten Ngada pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	71,38	48,66
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	38,15
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,0	6.90
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,0	Tidak dapat dilaksanakan
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	0,0	100
6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0,0	1,67

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Ngada Tahun 2025 sebesar Rp. 3.091.357.100,71 dari target Rp. 3.712.246.749,00 atau 83 % dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan target anggaran sebesar Rp. 272.293.000 dan terealisasi sebesar Rp. 270.009.000 atau 99%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Ngada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 secara umum berjalan dengan baik akan tetapi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga terdapat Belanja Permakan senilai

Rp.296.142.000,00 yang gagal pengadaan disebabkan oleh harga penawaran lebih tinggi dari standar harga. Hal itu mengakibatkan Anggaran belanja permakanan pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tidak dapat terealisasi.

- b. Persoalan terkait program PKH yakni Perubahan jumlah KPM yang dikarenakan adanya peningkatan Desil sehingga KPM yang tadinya berada di Desil 1 - 4 tidak bisa menerima Bantuan Sosial PKH dikarenakan sudah berpindah ke Desil 6 - 10. Selain itu Data Kependudukan yang tidak valid yang dikarenakan perubahan identitas yang tidak sesuai dengan Data Kependudukan terbaru juga menjadi kendala dalam penentuan KPM.
- c. Pelaksanaan Program ATENSI anak banyak permasalahan yang terjadi akibat Data kependudukan dari penerima manfaat dan Wali yang belum lengkap. Untuk penerima manfaat banyak yang belum memiliki Akta Kelahiran dan masih ada beberapa wali yang belum memiliki kartu keluarga sehingga pendamping sosial wajib melakukan advokasi untuk membantu penerima manfaat dan wali untuk mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
- d. Selain itu, banyak penerima manfaat yang berada di lokasi yang terpencil sehingga sangat sulit untuk meneruskan informasi mengenai Program ATENSI Anak. Terkadang untuk bisa datang ke Bank Penyalur, penerima manfaat dan wali kesulitan biaya dan akomodasi dikarenakan jarak tempuh yang jauh.

Solusi :

Pengawasan progres pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan terus dilakukan agar tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai penjadwalan dan penekanan pada output yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun 2023 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Ngada mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,4474 dan status kinerja Rendah. Sedangkan untuk tahun 2024 skor dan status kinerja terhadap EPPD Kabupaten Ngada belum diketahui karena belum terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan hal ini.
2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 belum diketahui karena sampai dengan akhir bulan Maret Tahun 2026, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada masih dalam proses audit oleh BPK Perwakilan Propinsi NTT. Selanjutnya dapat kami

sajikan Opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada selama 10 tahun terakhir sebagai berikut :

No.	Tahun	No. Surat	Opini BPK	Keterangan
1.	2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 No.32.a/LHP/XIX.KUP/06/2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	
2.	2017	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017, Nomor 29.a/LHP/XIX.KUP/08/2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	
3.	2018	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018, Nomor 38.a/LHP/XIX.KUP/06/2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
4.	2019	Surat BPK RI Perwakilan Provinsi NTT No. 227/S/XIX.KUP/07/2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
5.	2020	Surat BPK RI Perwakilan Provinsi NTT No. 406/S/XIX.KUP/07/2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
6.	2021	Surat BPK RI Perwakilan Provinsi NTT No. 495/S/XIX.KUP/072021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
7.	2022	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023, Nomor 187.A/LHP/XIX.KUP/06/2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
8.	2023	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023, Nomor 128.A/LHP/XIX.KUP/06/2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
9.	2024	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024, Nomor 80.A/LHP/XIX.KUP/06/2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
10.	2025			Dalam proses audit

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 target dan realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintahan Kabupaten Ngada Adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N (2025)	Realisasi Tahun N (2025)	%	Realisasi tahun N-1 (2024)	Anggaran Murni Tahun N
4	PENDAPATAN DAERAH		915.009.718.179,44	895.412.588.426,58	97,86	1.061.046.737.558,51	969.198.806.847,90
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.505.604.943,90	61.728.768.593,58	86,33	45.701.023.657,24	64.583.449.642,90
4.1.01	Pajak Daerah		21.849.140.142,90	13.882.728.842,10	63,54	10.663.409.255,00	22.849.140.142,90
4.1.02	Retribusi Daerah		31.587.009.500,00	30.248.841.803,35	95,76	4.848.846.432,58	32.009.709.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.084.889.240,00	1.884.889.240,00	90,41	1.132.734.946,00	3.800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		15.984.566.061,00	15.712.308.708,13	98,30	29.056.033.023,66	5.924.600.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		71.505.604.943,90	61.728.768.593,58	86,33	45.701.023.657,24	64.583.449.642,90
4.2	Pendapatan Transfer		835.481.716.183,71	825.897.154.293,00	98,85	1.008.016.183.534,00	896.997.969.266,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		818.598.998.592,00	809.076.589.032,00	98,84	825.955.699.025,00	885.826.884.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN		818.598.998.592,00	809.076.589.032,00	98,84	825.955.699.025,00	733.038.742.000
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		818.598.998.592,00	809.076.589.032,00	98,84	156.288.007.000,00	152.788.142.000
	Transfer Pemerintah Provinsi					25.772.477.509,00	11.171.085.266,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi					25.772.477.509,00	11.171.085.266,00

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		16.882.717.591,71	16.820.565.261,00	99,63	25.772.477.509,00	11.171.085.266,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		16.882.717.591,71	16.820.565.261,00	99,63	25.772.477.509,00	11.171.085.266,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		835.481.716.183,71	825.897.154.293,00	98,85	1.008.016.183.534,00	896.997.969.266,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		8.022.397.051,83	7.786.665.540,00	97,06	7.329.530.367,27	7.617.387.939,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		8.022.397.051,83	7.786.665.540,00	97,06	7.329.530.367,27	7.617.387.939,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			8.022.397.051,83	7.786.665.540,00	97,06	7.329.530.367,27	7.617.387.939,00
JUMLAH PENDAPATAN			915.009.718.179,44	895.412.588.426,58	97,86	1.061.046.737.558,51	969.198.806.847,90
5	BELANJA DAERAH		991.813.815.669,90	875.334.784.165,10	88,26		988.744.126.126,90
5.1	BELANJA OPERASI		689.807.215.710,90	599.733.315.100,27	86,94	604.339.338.396,55	679.397.666.265,90
5.1.01	Belanja Pegawai		463.716.765.424,76	384.683.442.371,82	82,96	364.195.201.081,04	479.978.352.063,94
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		220.240.894.166,14	209.434.216.728,45	95,09	205.735.681.132,51	195.344.058.201,96
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	1.716.406.250,00	
5.1.05	Belanja Hibah		5.231.556.120,00	5.037.656.000,00	96,29	30.916.949.933,00	1.835.256.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		618.000.000,00	578.000.000,00	93,53	1.775.100.000,00	2.240.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		689.807.215.710,90	599.733.315.100,27	86,94	604.339.338.396,55	679.397.666.265,90
5.2	BELANJA MODAL		90.185.492.279,00	80.716.792.145,83	89,50	205.394.092.085,65	102.706.252.181,00
5.2.01	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	493.108.795,00	

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		15.357.287.639,00	13.745.554.817,00	89,51	39.198.394.139,00	18.335.879.481,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		47.885.510.259,00	44.696.327.735,10	93,34	96.477.260.834,62	16.139.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		21.330.429.016,00	18.598.052.347,73	87,19	61.518.024.587,03	63.894.475.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.268.616.100,00	1.374.740.000,00	42,06	4.887.309.780,00	2.230.397.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		2.343.649.265,00	2.302.117.246,00	98,23	2.819.993.950,00	2.106.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		90.185.492.279,00	80.716.792.145,83	89,50	205.394.092.085,65	102.706.252.181,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		6.692.900.000,00	4.209.538.000,00	62,90	3.489.743.000,00	4.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		6.692.900.000,00	4.209.538.000,00	62,90	3.489.743.000,00	4.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		6.692.900.000,00	4.209.538.000,00	62,90	3.489.743.000,00	4.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER		205.128.207.680,00	190.675.138.919,00	92,95	202.276.083.242,00	202.140.207.680,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		1.111.486.800,00	867.937.405,00	78,09	658.216.937,00	1.111.486.800,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		204.016.720.880,00	189.807.201.514,00	93,04	201.617.866.305,00	201.028.720.880,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		205.128.207.680,00	190.675.138.919,00	92,95	202.276.083.242,00	202.140.207.680,00
	JUMLAH BELANJA		991.813.815.669,90	875.334.784.165,10	88,26	1.015.499.256.724,20	988.744.126.126,90
	SURPLUS/DEFISIT		(76.804.097.490,46)	20.077.804.261,48	(26,14)	45.547.480.834,31	-19.545.319.279,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH		79.746.727.490,46	77.689.357.490,46	97,42	80.247.025.989,19	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		79.746.727.490,46	79.746.727.490,46	100,00	80.247.025.989,19	22.487.949.279,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		79.746.727.490,46	79.746.727.490,46	100,00	80.247.025.989,19	22.487.949.279,00

	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		79.746.727.490,46	79.746.727.490,46	100,00	80.247.025.989,19	22.487.949.279,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		2.942.630.000,00	2.057.370.000,00	69,92	46.047.779.333,04	2.942.630.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah		2.942.630.000,00	2.057.370.000,00	69,92	3.797.779.333,00	2.942.630.000,00
6.2.02	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	42.250.000.000,04	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		2.942.630.000,00	2.057.370.000,00	69,92	46.047.779.333,04	2.942.630.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		76.804.097.490,46	77.689.357.490,46	101,15	34.199.246.656,15	19.545.319.279,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berjalan		0.00	97.767.161.751,94	0,00	79.746.727.490,46	0,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada /LRA sementara per 23 Februari 2026

5. INOVASI DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025

Inovasi Daerah Yang Telah DILAPORKAN kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah tahun 2025:

- Jumlah inovasi yg diusulkan dan diinput melalui aplikasi sebanyak 97 inovasi
- Jumlah inovasi inisatif 17
- Jumlah inovasi yg masih uji coba 11
- Jumlah inovasi yang diterapkan 71 inovasi

Persentase inovasi yg diterapkan 49,97% dan masuk dalam kategori kabupaten inovatif 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025, besar harapan agar ringkasan laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngada pada tahun berikutnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dalam membangun Kabupaten Ngada tercinta.

Bajawa, 31 Maret 2026

BUPATI NGADA,



